



EDISI KAMIS 20 AGUSTUS 2026

H A R I A N

LENTERA

Inspirasi Perubahan

TODAY

02

GOVERNMENTTODAY

Gempa NTT Sisakan 59 Ribu Pengungsi, Purbaya Soroti Koordinasi Penanganan Bencana

05

NUSANTARA

Gunung Arjuno-Welirang Ditutup Total, 3 Titik Api Dekati Jalur Pendakian

10

LISTSTYLE

Ghost Lashes, Tren Bulu Mata, Nyaris Tak Terlihat Digandrungi Zendaya hingga Dua Lipa

SAUDI BLOKIR RP66,6 M DP HAJI RI, ADA MASALAH?

Kabar mengejutkan diungkapkan Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj). Arab Saudi disebut memblokir 14 juta riyal atau sekitar Rp66,6 miliar dana down payment (DP) Haji Indonesia 2027. Wakil Menhaj, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan pembekuan uang itu terkait dugaan pelanggaran ketentuan asuransi pada penyelenggaraan Haji 2026. Salah satunya soal 600 jemaah Indonesia yang disebut memiliki sembilan penyakit kronis. Padahal semestinya mereka tidak lolos istitha'ah kesehatan. Pemerintah Indonesia mempersoalkan sanksi tersebut karena dana yang diblokir merupakan DP untuk haji 1448 Hijriah. Sementara persoalan yang dipermasalahkan berkaitan dengan musim 1447 Hijriah atau tahun ini. Pemerintah mengaku telah mengirim nota diplomatik keberatan dan meminta rincian dugaan pelanggaran untuk diverifikasi. Di tengah persoalan itu, muncul usulan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2027 sebesar Rp107.340.172,02 per jemaah. Angka itu naik sekitar Rp19,93 juta dari BPIH 2026 sebesar Rp87.409.365. Namun, kenaikan total biaya tersebut tidak sepenuhnya dibebankan kepada jemaah. Pemerintah mengusulkan komposisi 40 persen atau Rp42.936.068,81 dibayar jemaah. Sedangkan 60 persen atau Rp64.404.103,21 berasal dari nilai manfaat dana haji yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Pemerintah mengatakan skema tersebut disusun untuk meningkatkan kualitas layanan dengan tetap memperhatikan efisiensi dan efektivitas. Salah satu komponen yang naik adalah biaya penerbangan, dari Rp32.012.885 menjadi Rp40.529.919 per jemaah. Pemicunya akibat kenaikan harga avtur, nilai tukar, dan dinamika geopolitik. **SELENGKAPNYA DI HAL 11....**

Rencana Haji 2027

RP BPIH
Rp 107.340.172,02

RP Bipih
Rp 42.936.068,81

RP Nilai manfaat
Rp 64.404.103,21

2025

RP BPIH
Rp 107.340.172,02

RP Bipih
Rp 42.936.068,81

RP Nilai manfaat
Rp 64.404.103,21

2023

RP BPIH
sekitar Rp90 juta

RP Bipih
Rp 49,9 juta

RP Nilai manfaat
Rp 40,2 juta.

BIAYA HAJI INDONESIA

2026

RP BPIH
Rp 87.409.365,45

RP Bipih
Rp 54.193.806,58

RP Nilai manfaat
Rp 33.215.558,87

2024

RP BPIH
Rp 93,41 juta

RP Bipih
Rp 56,04 juta

RP Nilai manfaat
Rp 37,36 juta.

2022

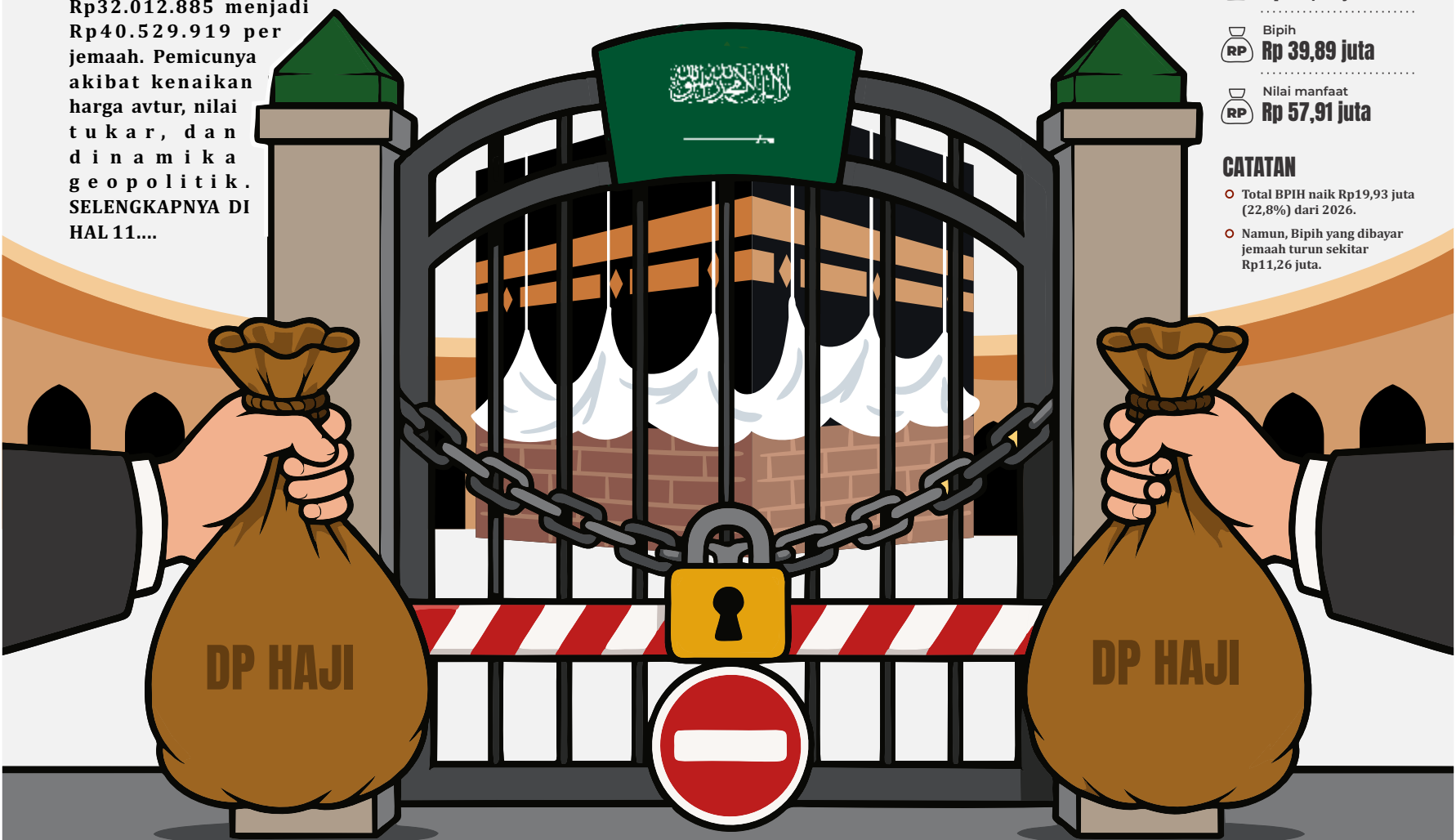
RP BPIH
Rp 97,79 juta

RP Bipih
Rp 39,89 juta

RP Nilai manfaat
Rp 57,91 juta

CATATAN

- Total BPIH naik Rp19,93 juta (22,8%) dari 2026.
- Namun, Bipih yang dibayar jemaah turun sekitar Rp11,26 juta.



GEMPA NTT SISAkan 59 RIBU PENGUNGSi, PURBAYA SOROTI KOORDINASI PENANGANAN BENCANA

Lima hari setelah gempa magnitudo 7,7 mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT), persoalan penanganan bencana belum sepenuhnya selesai. Jumlah korban meninggal dunia bertambah menjadi 71 orang, sementara 59.647 warga masih mengungsi. Di tengah situasi tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti koordinasi pemerintah pusat dan daerah yang dinilai belum berjalan optimal.

Data terbaru Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Rabu (19/8/2026) mencatat satu tambahan korban meninggal dari Kabupaten Nagekeo. Dengan demikian, total korban jiwa gempa NTT mencapai 71 orang. Jumlah pengungsi juga telah mencapai 59.647 orang, dengan Kabupaten Manggarai menjadi wilayah yang menampung pengungsi terbanyak, yakni 20.433 orang.

Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan peningkatan jumlah korban dan pengungsi masih terus dipantau melalui proses pendataan serta verifikasi di lapangan.

"Jumlah korban ada bertambah satu orang menjadi 71 yaitu di Kabupaten Nagekeo. Untuk jumlah total pengungsi yang banyak saat ini menurut catatan kami sebanyak 59.647 orang dan yang terbanyak ini ada di Manggarai sebanyak 20.433 orang," ujar Berton dalam konferensi pers daring, Rabu (19/8/2026).

Besarnya jumlah pengungsi membuat kebutuhan logistik menjadi salah satu persoalan utama. Hingga 18 Agustus, BNPB mencatat sebanyak 398 ton bantuan telah dikirim ke wilayah terdampak. Dari jumlah tersebut, 165 ton diangkut melalui jalur udara.

Pemerintah juga mengoptimalkan jalur laut dengan mengerahkan KRI Bung Hatta dari Labuan Bajo untuk menjangkau wilayah Manggarai dan Manggarai Timur.

Namun, distribusi bantuan tidak sepenuhnya mudah dilakukan. Kondisi geografis Flores yang didominasi wilayah berbukit, ditambah ruas jalan yang sempit dan labil, menjadi salah satu hambatan pengiriman logistik. BNPB juga



Sebuah bangunan Masjid Al-Istiqomah Ronting mengalami kerusakan akibat gempa bumi di Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (18/8/2026). (Antara)

menghadapi persoalan lain karena sebagian warga memilih mengungsi secara mandiri di sekitar rumah untuk menjaga harta benda.

Kondisi itu membuat proses pendataan sekaligus penyaluran bantuan menjadi lebih sulit.

Persoalan distribusi bantuan inilah yang kemudian mendapat sorotan Purbaya. Menteri Keuangan tersebut mengaku memperoleh laporan bahwa masih ada wilayah terdampak yang belum menerima bantuan, salah satunya Kelurahan Pota, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur.

Purbaya mengatakan akan meminta BNPB segera mengecek kondisi wilayah tersebut. Ia memastikan persoalan anggaran bukan alasan bagi penanganan bencana untuk tersendat.

"Kita akan minta BNPB untuk melihat daerah itu. Yang jelas dari Kementerian Keuangan, kami nyiapin dana yang cukup sehingga BNPB kinerjanya tidak terganggu," ujar Purbaya dalam keterangan video, Rabu (19/8/2026).

Purbaya bahkan mempertanyakan koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Menurut dia, persoalan tersebut terlihat ketika dirinya berkomunikasi langsung dengan BPBD di lapangan dan menemukan informasi yang belum tersampaikan secara memadai.

"Kayaknya seperti enggak ada koordinasi antara daerah sama pusat untuk penanggulangan bencananya. Karena ketika saya tanya di BPBD, banyak enggak tahunya," kata Purbaya.

Ia meminta jaringan pemerintahan di daerah dimanfaatkan secara maksimal agar informasi mengenai kebutuhan korban dapat diteruskan dengan cepat dan bantuan tidak berhenti di tingkat administratif.

"Jadi, mereka mesti memanfaatkan jaringan yang ada di daerah sehingga lebih cepat sampai ke daerah yang membutuhkan," ujarnya.

Purbaya sebelumnya juga menyatakan pemerintah menyiapkan anggaran awal sekitar Rp5 triliun di BNPB untuk penanganan bencana, termasuk gempa NTT. Pemerintah menyatakan anggaran tersebut dapat

ditambah apabila kebutuhan penanganan dan pemulihan meningkat.

Pada Rabu malam, Kementerian Keuangan juga dilaporkan menyalurkan Rp44 miliar untuk kebutuhan pemulihan bencana di Flores. Besaran tersebut akan dievaluasi berdasarkan perkembangan kebutuhan di lapangan.

Dengan demikian, persoalan penanganan gempa NTT tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan anggaran. Di satu sisi, pemerintah memastikan dana tersedia dan bantuan terus dikirim. Di sisi lain, medan geografis serta koordinasi antarlembaga menjadi faktor yang menentukan apakah bantuan tersebut benar-benar dapat segera diterima warga.

Purbaya mengatakan pemerintah pusat telah menyalurkan Rp44 miliar untuk penanganan awal dampak gempa bumi magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur (NTT). Dana tersebut belum menjadi batas akhir dukungan pemerintah karena kebutuhan anggaran akan dievaluasi berdasarkan perkembangan kondisi di lapangan.

Purbaya mengatakan pemerintah daerah dapat menggunakan terlebih dahulu dana yang telah disalurkan. Jika kebutuhan melebihi anggaran awal, pemerintah daerah diminta segera melaporkannya agar pemerintah pusat dapat mengajukan tambahan anggaran kepada Presiden. (tin, ant rls, kum/dya)



Kondisi Gereja St. Fransiskus Asisi-Karot yang rusak pascaditempa gempa bumi di Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, Senin (17/8/2026). (Reuters)

REVISI UU ASN DISIAPKAN, PEJABAT YANG REKRUT HONORER TERANCAH SANKSI PIDANA

Larangan mengangkat tenaga honorer di instansi pemerintah selama ini belum sepenuhnya menghentikan praktik perekrutan pegawai non-ASN. Komisi II DPR RI kini menyiapkan aturan yang lebih keras. Pejabat kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah yang tetap merekrut honorer terancam sanksi administratif, denda, bahkan pidana.

Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda mengatakan ketentuan tersebut akan diperjuangkan melalui revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2024-2029.

"Komisi II DPR RI melalui Prolegnas Tahun 2024-2029 terkait dengan revisi Undang-Undang ASN, kami akan memperjuangkan bagaimana adanya sanksi bagi pejabat, baik pada tingkat kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah yang tetap mengangkat honorer dan nomenklatur lainnya," kata Rifqinizamy, Rabu (19/8/2026).

Menurut dia, larangan perekrutan honorer selama ini tidak cukup kuat karena tidak dibarengi konsekuensi yang tegas. Kondisi itu membuat persoalan tenaga honorer terus berulang meski pemerintah telah menyediakan skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Karena selama ini pelarangan tidak diikuti dengan adanya sanksi sehingga kemudian kita terus mewarisi problem honorer yang ada di Indonesia yang sekarang sudah kita selesaikan melalui nomenklatur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau P3K," ujar Rifqinizamy.

Ia mengatakan sanksi yang tengah didorong DPR tidak sebatas hukuman administratif. Pejabat yang tetap melakukan pengangkatan tenaga honorer juga dapat dikenai denda hingga sanksi pidana.

Dengan demikian, revisi UU ASN nantinya tidak hanya mengatur status dan tata kelola aparatur, tetapi juga memperkuat mekanisme penegakan larangan pengangkatan pegawai non-ASN baru.

Pelarangan pengangkatan tenaga honorer bukan kebijakan baru. Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebelumnya telah menegaskan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan pejabat lainnya dilarang mengangkat tenaga non-ASN.

BKN menyebut ketentuan tersebut telah ditegaskan dalam Pasal



Ketua Komisi II DPR RI,
M. Rifqinizamy Karsayuda.

65 UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Sementara Pasal 66 mengamanatkan penataan pegawai non-ASN diselesaikan paling lambat Desember 2024 dan setelah UU berlaku instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain Pegawai ASN.

Dalam sistem ASN saat ini, hanya terdapat dua jenis pegawai, yakni PNS dan PPPK. BKN kembali menegaskan pada Maret 2026 bahwa tidak ada status ASN lain di luar dua kategori tersebut.

Pemerintah juga telah menempuh sejumlah skema untuk menyelesaikan persoalan tenaga non-ASN yang sudah terdata. Salah satunya melalui PPPK Paruh Waktu. BKN menjelaskan skema itu ditujukan antara lain bagi tenaga non-ASN yang masuk database BKN dan telah mengikuti seleksi CPNS atau PPPK 2024 tetapi belum memperoleh formasi. Karena itu, persoalan yang hendak dihentikan DPR bukan sekadar ke-beradaan tenaga honorer lama, melainkan praktik membuka kembali rekrutmen pegawai non-ASN baru dengan nama atau nomenklatur berbeda.

Dorongan memperketat larangan tersebut sejalan dengan sikap Kementerian Dalam Negeri. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto memastikan kepala daerah tidak lagi diperbolehkan merekrut staf atau pegawai baru di luar tahapan yang telah disepakati pemerintah.

"Kemendagri akan turun untuk mengawal, melakukan sosialisasi, dan memastikan kepala daerah tidak lagi

merekrut staf baru dan semuanya disesuaikan dengan tahapan yang disepakati berdasarkan rapat pada hari ini," kata Bima.

Pernyataan itu disampaikan setelah pemerintah dan DPR membahas persoalan kepegawaian daerah. Bima menyebut kepala daerah sebelumnya menyampaikan dua aspirasi kepada pemerintah pusat.

Pertama, daerah meminta bantuan fiskal untuk membayar gaji pegawai. Kedua, pemerintah daerah meminta kepastian mengenai alih status PPPK, baik paruh waktu maupun penuh waktu, menjadi PNS.

Rifqinizamy menilai kebijakan pemerintah terkait fiskal daerah dan status PPPK dapat mengurangi tekanan terhadap APBD.

Ia mengatakan pemerintah telah memberikan relaksasi transfer keuangan daerah, termasuk melalui penambahan Dana Alokasi Umum (DAU) dan pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH) kurang bayar pada 2026. Kebijakan tersebut, menurut dia, juga akan berlanjut dalam transfer ke daerah pada APBN 2027.

"Dari sisi batas bawah, yang sekarang kerap kali menghimpit APBD karena adanya kewajiban untuk membayar gaji P3K, khusus P3K guru di daerah akan ditarik menjadi ASN pusat," ujar Rifqinizamy.

"Itu artinya kewajiban daerah melalui APBD untuk melakukan pembayaran terhadap gaji P3K guru per tahun depan insyaallah tidak lagi menjadi sebuah kewajiban," lanjutnya.

DASAR HUKUM LARANGAN REKRUT HONORER

- **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN:** Mengamanatkan penataan tenaga non-ASN dan melarang pengangkatan honorer baru.
- **Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018:** Pasal 96 melarang Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) mengangkat pegawai non-PNS/non-PPPK untuk jabatan ASN.
- **Kebijakan Moratorium Pusat:** Badan Kepegawaian Negara (BKN) menegaskan penghapusan status honorer dan mengalihkan fokus ke PNS dan PPPK.

ALASAN UTAMA LARANGAN

- **Beban Anggaran Daerah:** Banyak daerah menghabiskan lebih dari 30% APBD untuk gaji pegawai.
- **Prioritas Pembangunan:** Anggaran daerah dialihkan untuk layanan publik, bukan menambah staf baru.
- **Efisiensi Sistem:** Pemerintah ingin semua pegawai direkrut lewat satu pintu resmi, yaitu seleksi CASN (PNS & PPPK).



Beban APBD dan Penataan PPPK Guru

Rencana pengalihan PPPK guru di daerah menjadi ASN pusat menjadi bagian penting dari penataan tersebut. DPR menilai kebijakan itu berpotensi mengurangi tekanan belanja pegawai daerah karena pemerintah pusat nantinya mengambil alih kewajiban pembayaran gaji PPPK guru yang masuk skema tersebut.

Rifqinizamy menyebut berkurangnya beban belanja pegawai akan memberikan ruang fiskal lebih besar bagi pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik.

Namun, kebijakan tersebut berjalan beriringan dengan pembatasan perekrutan baru. Daerah tidak bisa lagi menyiasati kebutuhan pegawai dengan membuka posisi honorer menggunakan nomenklatur lain.

Bagi DPR, pola lama tersebut justru berisiko menciptakan kembali persoalan yang selama bertahun-tahun hendak diselesaikan melalui penataan tenaga non-ASN dan pengadaan PPPK.

BKN sendiri sejak 2022 telah melakukan pendataan tenaga non-ASN sebagai bagian dari pemetaan jumlah dan kondisi pegawai honorer di instansi pemerintah. Pendataan tersebut bukan dimaksudkan sebagai jalur otomatis pengangkatan menjadi ASN. (tin,ist,kum/dya)

PRAPERADILAN FEBRIE: MINTA DIBEBASKAN, FOTO KELUARGA DIKEMBALIKAN

Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah meminta hakim praperadilan membatalkan status tersangka sekaligus memerintahkan Kejaksaan Agung membebaskannya dari tahanan. Tim kuasa hukum juga meminta sejumlah barang pribadi Febrie dan keluarganya, termasuk dokumen pribadi serta pigura foto keluarga, dikembalikan.



Tersangka kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Febrie Adriansyah (tengah) saat tiba di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (7/8/2026). (dok.ant)

Permintaan itu disampaikan dalam petitum praperadilan yang diajukan Febrie ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Tim hukum menilai penetapan tersangka, penahanan, penyidikan, hingga sejumlah tindakan penggeledahan dan penyitaan terhadap Febrie mengandung persoalan prosedural. Perkara tersebut terdaftar dengan nomor 134/Pid.Pra/2026/PNJKTSEL.

Kuasa hukum Febrie, Maqdir Ismail, meminta hakim menyatakan tidak sah Surat Ketetapan Nomor 4/P.3/F/Fd.2/07/2026 tanggal 24 Juli 2026 tentang penetapan tersangka Febrie. Tim hukum juga menggugat Surat Perintah Penahanan Nomor Print-43/F/Fd.2/07/2026 tanggal 24 Juli 2026.

"Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya, Surat Ketetapan Nomor 4/P.3/F/Fd.2/07/2026 tanggal 24 Juli 2026 tentang penetapan tersangka atas nama Febrie Adriansyah yang diterbitkan oleh Termohon," ujar Maqdir dalam persidangan, Rabu (19/8/2026).

Jika hakim mengabulkan permohonan tersebut, tim hukum meminta Kejagung segera mengeluarkan Febrie dari Rutan Kelas I Jakarta Timur Cabang Rutan KPK di Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan.

"Memerintahkan Termohon agar segera membebaskan dan mengeluarkan Pemohon dari Rumah Tahanan Negara (Rutan) Klas I Jakarta Timur Cabang Rutan KPK," kata Maqdir.

Selain penahanan, kubu Febrie meminta hakim menyatakan tidak sah Surat Perintah Penyidikan Jampidsus Nomor Print-03/F.2/Fd.2/07/2026 tanggal 20 Juli 2026 dan memerintahkan penghentian penyidikan berdasarkan surat tersebut.

Tim hukum juga meminta seluruh tindakan lanjutan terhadap Febrie maupun keluarganya yang bersumber dari surat perintah penyidikan tersebut dinyatakan tidak sah. Termasuk keputusan, penetapan, tindakan lanjutan, dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

Salah satu dalil utama kubu Febrie

berkaitan dengan pasal yang digunakan penyidik. Febrie diduga melanggar Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU TPPU secara alternatif dengan ketentuan dalam KUHP.

Maqdir mempersoalkan penggunaan ketentuan yang menurutnya telah dicabut melalui Pasal 622 KUHP. Ia merujuk asas penerapan ketentuan yang lebih menguntungkan bagi tersangka ketika terjadi perubahan aturan.

"Ini bukan kebaikan hati penegak hukum, melainkan hak yang juga

diakui dalam Kovenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik," ujar Maqdir.

Menurut dia, penggunaan pasal yang sudah dicabut secara bersamaan dengan pasal yang mencabutnya membuat Febrie tidak memperoleh kepastian mengenai ketentuan pidana mana yang sebenarnya menjadi dasar sangkaan.

Tim hukum juga mempersoalkan istilah trading in influence atau perdagangan pengaruh yang disebut dalam pertimbangan surat penetapan tersangka. Menurut mereka, meski Indonesia telah meratifikasi United Nations Convention Against Corruption melalui UU Nomor 7 Tahun 2006, perdagangan pengaruh belum dirumuskan sebagai tindak pidana tersendiri dalam hukum positif Indonesia.

"Selama belum ada undang-undang yang merumuskan perdagangan pengaruh beserta ancaman pidananya, maka tidak ada perbuatan pidana yang dapat dipersangkakan atas dasar itu," kata Maqdir.

Ia juga merujuk Putusan Mahkamah Agung Nomor 97 PK/Pid.Sus/2019 yang menurutnya menyatakan penggunaan pengaruh kekuasaan untuk memperoleh sesuatu belum diatur dan penerapannya bertentangan dengan asas legalitas.

Persoalan lain yang diajukan adalah tindak pidana asal atau predicate crime. Tim Febrie menilai surat penetapan tersangka tidak menguraikan secara jelas tindak pidana asal yang menjadi dasar penyidikan TPPU. (gus,kum,ist/dya)



Foto keluarga Febrie Adriansyah saat menggeledah sebuah rumah di Parahyangan Golf 2, Sentul, Kab. Bogor, Jawa Barat pada Rabu (8/7/2026). dok

GUNUNG ARJUNO-WELIRANG DITUTUP TOTAL, 3 TITIK API DEKATI JALUR PENDAKIAN

Kebakaran hutan di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Raden Soerjo kembali mengancam kawasan Gunung Arjuno-Welirang. Pengelola menutup seluruh aktivitas pendakian mulai Rabu (19/8/2026), setelah kebakaran yang pertama kali terdeteksi sehari sebelumnya memunculkan sedikitnya tiga titik api. Api bahkan dilaporkan mulai mendekati jalur dan area basecamp pendakian.

Kepala UPT Tahura Raden Soerjo Agustiningtyas Marini mengatakan kebakaran diketahui sejak Selasa (18/8). Berdasarkan pemantauan terbaru, tiga titik api terdeteksi di kawasan Sibong. "Terpantau di Sibong itu ada 3 titik api. Informasi terakhir itu (api) sudah hampir mendekati jalur atau basecamp areal pendakian di lerengnya," kata Tyas, Rabu (19/8/2026).

Karena kondisi tersebut, pengelola menerbitkan pengumuman bernomor 500.4.6.10/1276/123.7.2/2026 yang menetapkan penutupan seluruh aktivitas pendakian Gunung Arjuno-Welirang sampai batas waktu yang belum ditentukan. "Sehubungan dengan adanya kebakaran hutan yang terjadi pada tanggal 18 Agustus 2026 di kawasan Tahura R. Soerjo, maka mulai tanggal 19 Agustus 2026 seluruh aktivitas pendakian Gunung Arjuno-Welirang ditutup sementara sampai batas waktu yang tidak ditentukan," ujar Agustiningtyas dalam keterangan resminya.

Penutupan tidak hanya berlaku bagi pendaki yang baru akan berangkat. Pengelola meminta masyarakat tidak memaksakan diri memasuki kawasan melalui jalur yang ditutup. Aktivitas pendakian ilegal dinilai berisiko terhadap keselamatan sekaligus dapat menghambat proses penanganan kebakaran dan pemulihan kawasan.

Bagi pendaki yang sudah memiliki jadwal, Tahura Raden Soerjo menyediakan mekanisme penjadwalan ulang setelah jalur resmi dibuka. Pendaki terdampak dapat menghubungi admin dengan melampirkan nomor invoice dan menyampaikan tanggal pengganti yang diinginkan. Namun, tanggal tersebut tetap bergantung pada ketersediaan kuota. Masa berlaku reschedule diberikan selama satu tahun sejak jalur resmi kembali dibuka.

Sampai Rabu malam, belum ada kepastian kapan pendakian akan dibuka kembali. Keputusan pembukaan akan menunggu kondisi keamanan kawasan setelah penanganan kebakaran dinyatakan memadai. Pengelola pun meminta calon pendaki memantau informasi resmi sebelum menyusun kembali rencana perjalanan.

Di sisi lain, BPBD Kota Batu memastikan kebakaran yang



Kebakaran di Gunung Arjuno-Welirang Jawa Timur pada Selasa (18/8/2026).
(IG@tahuradensoerjo.official)

terdeteksi berada di kawasan Gunung Arjuno mengarah ke wilayah Pasuruan. Kepala BPBD Kota Batu Suwoko mengatakan informasi awal diterima sejak Selasa malam dan titik lokasi baru terkonfirmasi pada Rabu pagi.

"Informasi awal masuk sejak Selasa malam dan baru terkonfirmasi titik lokasinya Rabu pagi ini. Lokasi kebakaran berada di Gunung Arjuno, relatif jauh dari jangkauan pemukiman Kota Batu," kata Suwoko.

Meski belum mengancam permukiman Kota Batu secara langsung, BPBD tetap meningkatkan kewaspadaan untuk mengantisipasi perubahan arah rambatan api. (san,ist,rls/dya)

KEBAKARAN GUNUNG DI INDONESIA (PER 13 AGUSTUS 2026)



GUNUNG CIREMAI

- Status: Padam
- Lokasi: Jawa Barat
- Tanggal: 21 Juli 2026
- Dugaan Penyebab: Aktivitas Manusia
- Luas Terdampak: 14,9 ha



GUNUNG BROMO

- Status: Dalam upaya pemadaman
- Lokasi: Jawa Timur
- Tanggal: Sejak 3 Agustus 2026
- Dugaan Penyebab: Aktivitas Manusia
- Luas Terdampak: 942 ha



GUNUNG RINJANI

- Status: Padam
- Lokasi: NTT
- Tanggal: 7-8 Agustus 2026, 10 Agustus 2026
- Dugaan Penyebab: Aktivitas Manusia
- Luas Terdampak:
 - 30 ha (7-8 Agustus 2026)
 - 1,6 ha (10 Agustus 2026)



GUNUNG GEDE

- Status: Dalam upaya pemadaman
- Lokasi: Jawa Barat
- Tanggal: Sejak 6 Agustus 2026
- Dugaan Penyebab:
 - Faktor alam dan aktivitas manusia
- Luas Terdampak: 20 ha

Singapura Siapkan Skenario Darurat F1, Waspada Kabut Asap dari Indonesia

SINGAPURA mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kabut asap lintas batas dari kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Ancaman ini menjadi perhatian karena bertepatan dengan penyelenggaraan Formula 1 Singapore Grand Prix pada Oktober 2026, yang diperkirakan dapat terdampak jika kualitas udara memburuk.

Penyelenggara Singapore GP telah memasukkan kabut asap ke dalam rencana kontingensi acara. Jika polusi mengganggu jarak pandang, kesehatan penonton, atau operasional balapan, penyelenggara akan berkoordinasi dengan lembaga pemerintah untuk menentukan langkah selanjutnya.

"Rencana tersebut dirumuskan dan disempurnakan bersama para pemangku kepentingan dan lembaga pemerintah. Jika kabut asap menyebabkan masalah pada jarak pandang, kesehatan masyarakat, atau operasional, Singapore GP akan bekerja sama dengan lembaga terkait sebelum mengambil keputusan bersama mengenai penyelenggaraan

acara," kata juru bicara Singapore GP, seperti dikutip CNA, Rabu (19/8/2026).

Pemerintah Singapura juga menyiapkan masker N95, layanan medis, serta pengaturan kegiatan luar ruangan apabila kualitas udara memburuk.

Ancaman tersebut berkaitan dengan potensi meluasnya kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan. Badan Meteorologi Singapura memperingatkan kondisi berkabut dapat terjadi apabila kebakaran di Indonesia semakin meluas. Risiko dinilai meningkat seiring prakiraan kondisi kering dan potensi El Nino kuat pada paruh kedua 2026.

Singapura memiliki pengalaman menghadapi situasi serupa. Pada September 2019, kabut asap dari kebakaran Indonesia sempat menurunkan kualitas udara selama penyelenggaraan F1. Kualitas udara ketika itu mencapai kategori tidak sehat dan bau asap tercium di sekitar lokasi balapan. Meski demikian, sekitar 268 ribu penonton tetap menghadiri ajang tersebut. Penyelenggara saat itu

menyediakan masker N95 dan petugas pertolongan pertama.

Di lokasi F1, pemerintah melalui Haze Task Force menyiapkan sejumlah langkah antisipasi. Informasi mengenai perkembangan kabut asap akan diberikan kepada penonton, sementara bantuan medis dan masker N95 akan tersedia jika diperlukan. (gys,cna,ist/dya)

Soroti PKL Liar, DPRD Kota Malang Buka Opsi Sediakan Ruang Usaha



ekonomi masyarakat tetap dapat berjalan tanpa mengganggu penataan kota.

"Karena sebenarnya ini bagian dari tata kota. Kami berharap di RPJMD yang ini, seperti yang telah disampaikan sebelumnya, saat ini sudah mulai masuk ke infrastruktur. Artinya masyarakat juga apabila ingin punya ruang usaha harus terfasilitasi seperti apa nanti," ujar Amithya, Rabu (19/8/2026).

Ketua DPRD Kota Malang ini menilai penyediaan ruang usaha menjadi salah satu hal yang perlu dikaji agar aktivitas PKL dapat ditata tanpa terus berujung pada pola penertiban yang sama. "Apakah kemudian kita bisa punya tambahan untuk etalase teman-teman yang akan berjualan. Akan didata seperti apa. Itu kan masih belum," katanya.

Politisi PDI Perjuangan ini menegaskan, persoalan tersebut

menjadi sorotan Banggar agar penataan PKL dapat dilakukan secara lebih terarah dan pada akhirnya membuat Kota Malang semakin tertata. "Makanya ini menjadi salah satu sorotan kami. Supaya kota ini semakin tertata," imbuhnya.

Disinggung terkait alokasi anggaran operasi penertiban yang berulang karena PKL kembali berjualan di lokasi yang sama, Amithya mengatakan pemerintah perlu melihat persoalan tersebut dari sisi kebutuhan ekonomi masyarakat.

Menurutnya, keberadaan PKL tidak semata-mata persoalan ketertiban, tetapi juga menunjukkan adanya kebutuhan masyarakat terhadap ruang untuk menjalankan kegiatan ekonomi.

"Apakah memungkinkan nanti untuk menyediakan tempat di seputaran area yang banyak PKL-nya, misalkan. Apabila memungkinkan, mari kita hitung bersama, apa yang dibutuhkan. Karena kan itu investasi infrastruktur juga maka harus dipikirkan," pungkasnya.

Sementara itu, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat mengatakan Pemkot Malang akan terus melakukan penataan PKL. Pihaknya juga

mengakui penertiban dinilai perlu dibarengi dengan skema penyelesaian yang lebih berkelanjutan.

"Kami terus mencari skenario baru untuk penyelesaiannya. Tetapi saya juga meminta ada kesadaran dari PKL yang sebenarnya sudah mengetahui terkait dengan beberapa larangan-larangan lokasi berjualan," katanya.

Menurut Wahyu, salah satu skema yang tengah dijajaki adalah membangun kerja sama dengan perguruan tinggi, terutama untuk menangani PKL yang berada di sekitar kawasan kampus. "Kalau terhadap PKL yang ada di sekitar perguruan tinggi, kami kerja sama dengan perguruan tingginya," jelasnya.

Pemkot Malang, lanjut Wahyu, ingin mencari pola penataan yang tidak sepenuhnya bergantung pada pembiayaan APBD. Dengan demikian, penanganan PKL tidak hanya berorientasi pada operasi penertiban, tetapi juga mencari solusi yang dapat menekan pembiayaan pemerintah.

"Intinya kami akan cari skema yang tanpa terlalu banyak membebani APBD, tetapi justru akhirnya kami bisa menghemat terkait dengan pembiayaan tersebut," tegasnya. (Santi/Dya)

MALANG - Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) liar menjadi sorotan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Malang dalam pembahasan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026.

Ketua DPRD Kota Malang sekaligus Ketua Banggar, Amithya Ratnanggani Sirraduhita membuka opsi penyediaan ruang usaha. Agar aktivitas

Pajak Hiburan Kota Batu Tembus Rp35 Miliar

BATU - Penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sektor hiburan di Kota Batu mencapai Rp35 miliar hingga pertengahan Agustus 2026. Angka tersebut setara dengan 83 persen dari target penerimaan sepanjang tahun yang dipatok sebesar Rp42,4 miliar.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batu, M Nur Adhim, menyebut capaian ini dinilai menjadi salah satu indikator geliat perekonomian Kota Batu, khususnya dari aktivitas pariwisata dan hiburan yang tetap ramai dikunjungi masyarakat.

"Jadi (PBJT) hiburan sudah 83 persen. Kalau berbicara yang memengaruhi capaian ini bukan semata pengawasan dan digitalisasi layanan, tetapi ada indikasi perekonomian berjalan dengan baik sehingga masyarakat banyak yang melakukan kegiatan healing (liburan)," ujar Adhim, dikutip pada Rabu (19/8/2026).

Menurutnya, Kota Batu masih

menjadi salah satu destinasi pariwisata unggulan di Jawa Timur. Kondisi tersebut membuat wisatawan dari berbagai daerah terus berdatangan dan membelanjakan uangnya di berbagai destinasi wisata maupun tempat hiburan.

Momen libur panjang sepanjang 2026 ini juga disebut ikut mendorong peningkatan aktivitas wisatawan. Berdasarkan data kunjungan wisata, sekitar 296 ribu wisatawan tercatat datang ke Kota Batu pada Mei 2026, ketika terdapat 4 agenda libur panjang.

Tak berhenti di situ, kata Adhim, lonjakan kunjungan kembali terlihat saat periode libur sekolah yang berlangsung sejak akhir Juni hingga pertengahan Juli 2026. Pada periode tersebut, kunjungan wisatawan ke Kota Batu mencapai sekitar 397 ribu orang.

Peningkatan aktivitas wisata tersebut turut berdampak terhadap penerimaan pajak dari sektor hiburan. Di sisi lain, Bapenda menilai

kepatuhan pengelola tempat hiburan dalam menyetorkan pajak yang dipungut dari masyarakat juga berperan terhadap capaian penerimaan.

"Faktor kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam menyetorkan pajak yang diberikan oleh masyarakat. Jadi, kekurangan sangat bisa tercapai, apalagi belum triwulan ketiga belum habis," kata Adhim.

Lebih lanjut, menurut Adhim secara keseluruhan, realisasi pajak daerah Kota Batu sepanjang Januari hingga pertengahan Agustus 2026 mencapai Rp165,6 miliar atau 57,68 persen dari target tahunan sebesar Rp287,1 miliar.

Selain PBJT hiburan, sejumlah sektor juga telah menyumbang penerimaan pajak daerah. PBJT hotel tercatat mencapai Rp28 miliar dari



Kepala Bapenda Kota Batu, M Nur Adhim. (Santi/Lentera)

target Rp39,4 miliar. Sementara PBJT makanan dan minuman mencapai Rp25,9 miliar dari target Rp35,9 miliar.

Adapun penerimaan PBJT tenaga listrik mencapai Rp12,7 miliar dari target Rp18,4 miliar. PBJT parkir sebesar Rp861,9 juta dari target Rp1,1 miliar. (Santi/Dya)

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali membuka pintu dialog dengan pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong Un. Di saat yang sama, Washington memangkas keterlibatan dalam latihan militer bersama Korea Selatan (Korsel) yang selama ini menjadi salah satu instrumen utama penangkalan terhadap Pyongyang.

Dikutip Rabu (19/8/2026), Trump memerintahkan Pentagon untuk “secara signifikan mengurangi” keterlibatan Amerika Serikat dalam latihan militer bersama Korea Selatan. Ia menyebut latihan tersebut mahal dan menilai pelaksanaannya akan mengirimkan “sinyal yang sepenuhnya tidak pantas dan bermusuhan” kepada Korea Utara.

Trump pada Minggu (16/8/2026) mengatakan telah menggambarkan Kim Jong Un sebagai pemimpin yang “tidak mengancam dan menghormati” kepresidenannya.

Keputusan itu kemudian berimbas pada pelaksanaan Ulchi Freedom Shield (UFS). Latihan yang semula dijadwalkan berlangsung 17-27 Agustus dipangkas menjadi lima hari, yakni 17-21 Agustus. Sejumlah latihan lapangan juga dikurangi dan fase kedua yang mencakup operasi serangan balik dibatalkan.

Pada hal, latihan gabungan AS-Korea Selatan selama ini menjadi bagian penting dari kesiapan menghadapi kemungkinan serangan Korea Utara.

Yang membuat keputusan tersebut mendapat perhatian bukan hanya pengurangan latihan militer, melainkan waktunya.

Pada Senin (17/8/2026), Trump mengatakan Kim Jong Un telah merespons tawarannya untuk melanjutkan kembali perundingan.

Trump bahkan disebut mendorong para pembantunya untuk mengatur pertemuan baru dengan Kim. Pertemuan itu berpotensi berlangsung pada musim gugur atau bertepatan dengan agenda Trump ke Asia pada November. Namun, rencana tersebut belum dapat dipastikan.

Ini bukan kali pertama Trump dan Kim membangun komunikasi langsung. Keduanya telah bertemu tiga kali pada periode pertama pemerintahan Trump, termasuk pertemuan bersejarah di Singapura pada 2018 dan pertemuan di Hanoi pada 2019.

Pertemuan Hanoi berakhir tanpa kesepakatan. Persoalan utama kala itu adalah perbedaan mengenai langkah denuklirisasi Korea Utara dan



Siaran televisi Yonhap News TV asal Korea Selatan, Senin (17/8/2026) ini menayangkan arsip foto Donald Trump saat bertemu Kim Jong-un terkait rencana AS membuka kembali dialog langsung dengan Korut. (ist.yonhap)

TRUMP RANGKUL KORUT, PANGKAS LATIHAN MILITER DENGAN KORSEL

pencabutan sanksi Amerika Serikat.

Kini, kondisi geopolitik berubah. Kim tidak lagi berada dalam posisi yang sama seperti 2019. Korea Utara semakin dekat dengan Rusia, terutama setelah Pyongyang memberikan dukungan militer kepada Moskow dalam perang melawan Ukraina.

Pyongyang Justru Makin Kuat

Hubungan Korea Utara dan Rusia berkembang menjadi salah satu faktor penting yang mengubah kalkulasi strategis Kim.

Pyongyang dilaporkan telah mengirim tentara, persenjataan, dan dukungan militer untuk membantu Rusia dalam perang Ukraina. Sebagai imbalannya, Korea Utara memperoleh akses terhadap dukungan energi,

ekonomi, dan teknologi militer Rusia.

Kerja sama tersebut membuat Kim memiliki alternatif selain bergantung pada hubungan dengan Washington.

Leif-Eric Easley, profesor studi internasional di Ewha Womans University, menilai kondisi tersebut membuat tawaran Trump belum tentu menarik bagi Pyongyang.

“Penghematan biaya dari pengurangan latihan ini marjinal, sementara manfaat diplomatik bagi hubungan dengan Korea Utara masih diragukan,” kata Easley.

Ia mengatakan Kim menunjukkan “tidak ada minat” terhadap tawaran Washington dan Seoul untuk membahas kemungkinan penghapusan senjata nuklir Korea Utara.

“Kim Jong Un menunjukkan tidak ada minat terhadap tawaran Washington dan Seoul untuk membahas kemungkinan penghapusan persenjataan nuklir Korea Utara,” ujarnya.

Menurut Easley, Pyongyang kini sibuk meraup keuntungan dari perang Rusia-Ukraina sekaligus memodernisasi militernya.

Posisi Kim itu diperkuat oleh perubahan fundamental dalam hubungan antar-Korea. Korea Utara telah meninggalkan tujuan reunifikasi yang selama puluhan tahun menjadi bagian dari kebijakan resminya.

Pyongyang juga mengubah konstitusinya dengan menetapkan Korea Selatan sebagai musuh utama.

Korea Utara pun terus mengembangkan kemampuan nuklir dan rudalnya.

Pada Jumat (14/8/2026), Pyongyang mengancam akan menerapkan “level baru” penangkalan nuklir sebagai respons terhadap latihan AS-Korea Selatan. Media pemerintah Korea Utara menyebut latihan tersebut sebagai “geladi bersih untuk perang invasi”.

Karena itu, pemangkasan latihan oleh Washington justru dapat memberikan keuntungan propaganda bagi Kim. (gus,ist,rtr/dya)



Kendaraan lapis baja K200 KIFV milik militer Korsel melintasi jembatan ponton (jembatan apung) dalam latihan militer bersama AS di tahun 2025. (Afp.dok)

Bosan Makan Buah Begitu Saja? Coba Kreasi Pizza hingga Smoothie

Buah sering menjadi pilihan sederhana untuk memenuhi kebutuhan vitamin, mineral, serat, dan cairan. Namun, rutinitas makan buah dengan cara yang sama dikupas, dipotong, lalu langsung dimakan, bisa membuat sebagian orang cepat bosan.

Padahal, buah dapat diolah menjadi berbagai sajian tanpa harus kehilangan karakter segarnya. Mulai dari smoothie untuk sarapan, salad buah sebagai camilan, hingga popsicle dan pizza buah untuk dessert.

Ada sejumlah cara kreatif menikmati buah agar kebiasaan makan buah terasa lebih menyenangkan. Namun, satu catatan penting, kreatif mengolah buah bukan berarti harus menambahkan banyak gula.

Harvard T.H. Chan School of Public Health menyarankan buah utuh sebagai pilihan utama. Smoothie tetap bisa menjadi pilihan jika seluruh bagian buah yang dapat dimakan ikut diblender dan tidak diberi tambahan pemanis berlebihan.

Buat smoothie

Smoothie menjadi cara paling mudah mengubah buah menjadi minuman yang lebih menarik.

Pisang, stroberi, mangga, dan blueberry dapat diblender bersama sedikit susu atau jus buah. Jika menggunakan buah yang sudah dibekukan, teksturnya akan menjadi lebih kental dan dingin.

Untuk smoothie bowl, tuangkan hasil blender ke dalam mangkuk. Kemudian tambahkan topping seperti potongan buah segar, granola, chia seed, atau kelapa parut.

Madu bisa digunakan untuk menambah rasa manis. Namun, penggunaannya sebaiknya tidak berlebihan.

Harvard menjelaskan bahwa smoothie yang menggunakan sebagian besar atau seluruh buah, termasuk daging buah dan seratnya, dapat mempertahankan banyak kandungan nutrisi. Meski begitu, buah utuh cenderung lebih mengenyangkan karena membutuhkan proses mengunyah. Karena itu, smoothie lebih baik diposisikan sebagai variasi, bukan selalu pengganti buah utuh.

Salad buah dengan yogurt dan madu

Tidak ingin menggunakan blender? Salad buah bisa menjadi pilihan. Potong apel, anggur, melon, kiwi, stroberi, atau buah lain sesuai

selera. Campurkan dengan plain yogurt atau Greek yogurt. Tambahkan sedikit madu jika ingin rasa lebih manis. Kacang almond atau biji-bijian juga bisa digunakan untuk memberikan tekstur renyah.

Salad buah bisa disimpan sebentar di lemari pendingin sebelum disantap. Hasilnya menjadi camilan yang segar, terutama pada siang atau sore hari. Harvard juga menyarankan menyimpan buah yang sudah dicuci atau dipotong di tempat yang mudah terlihat agar lebih mudah diambil ketika ingin ngemil.

Bekukan menjadi popsicle

Cuaca panas bisa menjadi alasan untuk mengubah buah menjadi camilan dingin.

Caranya sederhana. Haluskan buah atau gunakan jus buah, kemudian tuangkan ke dalam cetakan popsicle. Potongan buah kecil bisa dimasukkan ke dalam cetakan sebelum dibekukan. Stroberi, mangga, semangka, kiwi, dan buah beri bisa menjadi pilihan.

Namun, jika menggunakan jus, perhatikan kandungan gula. Pilih jus 100 persen buah tanpa tambahan gula.

Pedoman Diet Amerika Serikat 2025–2030 menempatkan buah utuh sebagai bagian penting dari pola makan berbasis makanan utuh dan padat nutrisi. Jadi, popsicle buah sebaiknya dibuat sesederhana mungkin agar buah tetap menjadi bahan utamanya.

Olah menjadi sorbet

Selain popsicle, buah beku bisa diubah menjadi sorbet. Caranya, bekukan potongan buah terlebih dahulu. Setelah cukup beku, blender hingga teksturnya lembut dan menyerupai es krim.

Pisang, mangga, stroberi, dan buah beri cocok digunakan.

Harvard bahkan memberikan contoh dessert berbahan pisang beku. Pisang yang telah dibekukan dapat diblender dengan sedikit cairan hingga menghasilkan tekstur lembut seperti es krim. Kelebihannya, Anda dapat mengontrol sendiri bahan yang digunakan.

Bikin pizza buah

Kalau ingin sesuatu yang lebih unik, coba pizza buah. Gunakan tortilla atau dasar pizza tipis. Oleskan yogurt atau krim

keju sebagai lapisan dasar, kemudian tata stroberi, kiwi, anggur, dan blueberry di atasnya. Tambahkan sedikit madu atau sirup maple bila menginginkan rasa lebih manis. Pizza buah cocok disajikan sebagai dessert saat berkumpul bersama keluarga. Warnanya yang beragam juga membuat sajian terlihat lebih menarik.

Trik seperti ini bisa membantu menjadikan buah sebagai bagian dari pengalaman makan yang menyenangkan, bukan sekadar makanan yang harus dikonsumsi karena alasan kesehatan.

Susun fruit parfait

Fruit parfait bisa menjadi pilihan sarapan atau camilan yang praktis.

Siapkan gelas transparan. Masukkan yogurt, kemudian granola dan potongan buah. Ulangi hingga membentuk beberapa lapisan.

Gunakan mangga, pisang, stroberi, blueberry, atau buah lain sesuai selera.

Perpaduan yogurt yang lembut, buah yang segar, dan granola yang renyah memberikan variasi tekstur dalam satu sajian. Agar tetap menjadi pilihan yang sehat, pilih yogurt tanpa banyak gula tambahan dan granola dengan kandungan gula yang tidak berlebihan.

Buat fruit cooler

Tidak semua kreasi buah harus berupa makanan. Harvard T.H. Chan School of Public Health menawarkan konsep fruit cooler yang menggunakan sedikit buah, air soda tanpa gula, es, serta tambahan mint atau irisan jeruk. Dalam salah satu resepnya, satu gelas 12 ons fruit cooler hanya sekitar 18 kalori karena tidak menggunakan tambahan gula.

Cara ini bisa menjadi alternatif ketika ingin minuman dingin dengan rasa buah tanpa menjadikannya minuman manis.

Kreativitas dalam mengolah buah tetap perlu memperhatikan bahan tambahan. (farist/dya)



Spotify Mulai Bedakan Artis AI, Musiknya Tak Otomatis Masuk Rekomendasi

Batas antara musisi manusia dan artis virtual semakin tipis. Spotify kini menyiapkan cara baru agar pendengar mengetahui ketika sosok di balik sebuah profil artis merupakan identitas yang dibuat dengan kecerdasan buatan (AI).

Mulai pertengahan September 2026, Spotify akan memperkenalkan label "AI Persona" pada profil artis yang identitas publiknya dibuat menggunakan AI. Langkah ini sekaligus mengubah cara Spotify memperlakukan musik dari profil tersebut dalam sistem rekomendasinya.

Spotify menyatakan musik dari profil berlabel AI Persona tidak akan dimasukkan ke dalam rekomendasi editorial maupun algoritmik secara default. Lagu tersebut tetap dapat ditemukan dan didengarkan, tetapi

tidak akan otomatis didorong kepada pengguna melalui sistem rekomendasi, kecuali pengguna memang mengikuti artis tersebut.

Kebijakan ini bukan berarti Spotify melarang musik yang dibuat dengan bantuan AI. Fokus label justru berada pada identitas artis, bukan teknologi yang digunakan untuk memproduksi lagunya.

Artis manusia yang menggunakan AI untuk membantu menulis, menyunting, membuat vokal, instrumen, atau bagian tertentu dari produksi musik tetap dapat menggunakan teknologi tersebut tanpa otomatis mendapat label AI Persona.

Spotify sebelumnya juga menegaskan bahwa artis yang memakai AI secara bertanggung jawab tetap dapat memperoleh tanda verifikasi selama mereka menampilkan identitas secara autentik.

Label "Likely AI Persona"

Spotify juga menyiapkan kategori "Likely AI Persona" atau "Kemungkinan AI Persona". Label ini digunakan ketika perusahaan menduga sebuah profil menggunakan identitas AI, tetapi belum memiliki kepastian yang cukup.

Artis dapat mengungkapkan sendiri kepada Spotify bahwa mereka merupakan AI Persona.

Namun, Spotify juga akan melakukan pemeriksaan mandiri terhadap sejumlah profil.

Proses tersebut menggabungkan peninjauan manusia dan teknologi AI untuk menemukan akun yang diduga menggunakan foto atau identitas manusia fotorealistik yang sebenarnya dibuat AI. Jika terjadi kesalahan, artis dapat mengajukan banding.

Label tersebut nantinya dirancang untuk memberikan konteks kepada pendengar di sejumlah bagian layanan Spotify, termasuk profil artis dan hasil pencarian.

Spotify mengambil langkah ini setelah mendapat masukan dari pengguna yang merasa tertipu ketika menemukan profil yang terlihat seperti manusia, tetapi ternyata merupakan persona buatan AI. Perusahaan mengatakan ingin

membangun pengalaman mendengarkan yang lebih transparan dan dapat dipercaya. Di sinilah persoalan baru muncul.

Sebuah lagu dapat sepenuhnya dibuat menggunakan AI, tetapi jika profil artisnya tidak menampilkan identitas manusia buatan AI, lagu tersebut belum tentu memperoleh label AI Persona.

Artinya, kebijakan baru Spotify tidak sama dengan label "AI-generated music" pada setiap lagu.

Hapus Suara Artis Asli Tanpa Izin

Spotify juga memperkuat perlindungan terhadap identitas vokal musisi.

Musik yang menggunakan suara artis sungguhan tanpa izin dapat dihapus dari platform. Aturan tersebut berlaku ketika suara seorang musisi ditiru menggunakan AI maupun metodelain.

Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya Spotify menghadapi persoalan voice cloning dan impersonasi.

Spotify sebelumnya menegaskan bahwa peniruan suara artis hanya diperbolehkan jika artis yang bersangkutan memberikan izin. Perusahaan juga mengembangkan sistem untuk mencegah musik dikirim secara curang ke profil artis lain.

Masalah tersebut semakin penting karena produksi musik menggunakan AI menjadi jauh lebih mudah.

Spotify bahkan menguji fitur Artist Profile Protection, yang memungkinkan artis meninjau sejumlah rilisan sebelum lagu tersebut muncul di profil mereka. (far/ist/dya)



HARIAN
LENTERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENTERA TODAY"
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, ARIEF SUKAPUTRA, MUHIBUDIN KAMALI

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



MEDIA TERVERIFIKASI

BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO I SIDAARJO: TEGUH A I GRESIK: ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) I MOJOKERTO: NUR HIDAYAH I LAMONGAN: L HANDI I BLITAR: ARIEF SUKAPUTRA I KEDIRI: AIS I JOMBANG : SUTONO I PASURUAN-PROBOLINGGO- PONOROGO : IMAN SANTOSO I BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI: PURCAHYONO JULIATMOKO I MADIUN: WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) I MALANG RAYA: SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. I TRENGGALEK: HERLAMBAANG I MADURA RAYA: SAHLAN KURNIAWAN I NGAWI: DIMAS RIDHO SURYO BASKORO I DKI JAKARTA: FUAD HASSAN I LOMBOK BARAT: MUHAYYAN I PALANGKA RAYA: NOVITA MASNIARI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH I MARKETING COMMUNICATION JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN I SEKERTARIS FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILA DESAIN GRAFIS PAULUS IVAN, FADHILA I ALAMAT REDAKSI JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26, JL TENGGILIS TENGAH 4 I TELP 03187854491 I PENERBIT PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA I ALAMAT PERCETAKAN SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA I TELP IKLAN 031-87854491 I NIB 91205006801134 I HARGA IKLAN RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal wartawan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal wartawan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

Ghost Lashes, Tren Bulu Mata Nyaris Tak Terlihat *Digandrungi Zendaya hingga Dua Lipa*

Maskara selama ini menjadi salah satu senjata utama untuk membuat mata terlihat lebih besar, lentik, dan dramatis. Namun, tren kecantikan 2026 justru bergerak ke arah sebaliknya.

Bulu mata yang nyaris tidak terlihat atau ghost lashes kini menjadi salah satu gaya makeup yang mencuri perhatian. Zendaya, Dua Lipa, Gigi Hadid, Hailey Bieber hingga Gracie Abrams termasuk deretan selebritas yang tampil dengan riasan mata sangat minimalis.

Alih-alih membuat bulu mata tebal dan bervolume, ghost lashes menonjolkan bulu mata asli. Efek akhirnya ringan, lembut, bersih, dan seolah-olah pemakainya tidak menggunakan maskara.

Ghost lashes sebenarnya bukan tren yang sepenuhnya baru. Makeup artist Lisa Eldridge menyebut gaya tersebut memiliki akar dari estetika makeup era 1990-an.

"Waktu itu mulai muncul maskara yang hanya memberi sedikit warna pada bulu mata, dan produk tersebut sangat populer karena pas untuk tampilan minimal grunge," jelas Eldridge, seperti dikutip dari Vogue.

Menurutnya, tren makeup saat ini memang semakin mengarah pada tampilan yang lebih lembut, terutama pada area mata. "Tren makeup saat ini memang lebih condong ke arah riasan yang lembut, terutama untuk area mata," ujarnya.

Makeup artist Emily Wood melihat ghost lashes sebagai bentuk makeup yang sengaja dibuat seolah-olah tidak ada. "Banyak orang berusaha untuk terlihat seperti mereka tidak memakai makeup," katanya.

tapi tetap terlihat elegan dan penuh percaya diri," kata Wood.

Karakter tersebut menjadi daya tarik utama ghost lashes. Bulu mata tidak dibuat sebagai pusat perhatian, tetapi tetap memberikan bingkai lembut pada mata.

Majalah British Vogue mencatat pencarian istilah ghost lashes sempat meningkat dua kali lipat dalam beberapa pekan ketika tren itu mulai ramai pada 2025. Saat itu, Dua Lipa, Hailey Bieber, Tracee Ellis Ross, dan Kylie Jenner termasuk selebritas yang ikut mengadopsinya.

Tren ini kemudian semakin kuat pada 2026. Ghost lashes terlihat di sejumlah panggung mode dan karpet merah internasional. Pada Met Gala 2026, Gigi Hadid, Audrey Nuna, Gwendoline Christie, Gracie Abrams, dan Hunter Schafer tampil dengan riasan mata yang tidak menonjolkan maskara hitam. Harper's Bazaar mencatat sejumlah dari mereka memilih tampilan bulu mata yang sangat samar, sementara sebagian lainnya menggunakan warna cokelat yang lebih lembut.

Gigi Hadid, misalnya, menggunakan maskara cokelat dalam tampilan Met Gala tersebut. Artinya, konsep ghost lashes tidak selalu berarti benar-benar tanpa produk. Prinsip utamanya adalah maskara tidak menjadi pusat perhatian.

Mengapa Disukai?

Menurut Eldridge, perubahan tersebut berkaitan dengan kejenuhan terhadap makeup berat. "Banyak orang kini lelah dengan makeup berat yang

seakan 'membentuk ulang' wajah untuk memenuhi standar kecantikan konvensional," terangnya.

Karena itu, ghost lashes tidak sekadar soal meninggalkan maskara. Tren ini membawa gagasan tentang penerimaan terhadap karakter wajah alami.

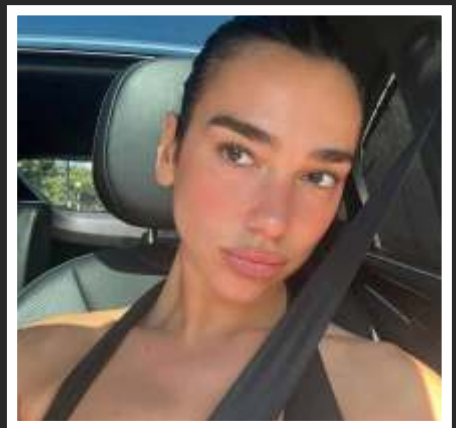
"Ghost lashes mengajak wanita untuk menerima sekaligus menonjolkan keunikan diri. Ini bagian dari pendekatan makeup yang lebih artistik, kreatif, dan minimalis," kata Eldridge. Emily Wood juga melihat ada unsur keberanian dalam tampilan tersebut.

Menurutnya, bulu mata yang nyaris tidak terlihat dapat memberikan kesan "undone sophistication" atau kecanggihan yang sengaja dibuat tidak terlalu sempurna. Tampilan tersebut justru menjadi lebih kuat ketika dipadukan dengan elemen makeup lain yang lebih ekspresif.

Majalah Parade juga melihat ghost lashes sebagai salah satu tren makeup utama musim semi 2026. Makeup artist New York Markphong Tram menjelaskan kepada media tersebut mengapa sebagian makeup artist mulai mengurangi penggunaan maskara ketika memasuki musim yang lebih hangat.

Bukan Berarti Tanpa Makeup

Salah satu kesalahpahaman mengenai tren ini adalah anggapan bahwa ghost lashes berarti wajah harus benar-benar polos. Justru sebaliknya. Bulu mata yang dibuat minimal dapat menjadi penyeimbang untuk elemen makeup lain.



Wood menyarankan ghost lashes dipadukan dengan blush yang lebih terlihat, kulit dewy, atau warna bibir yang kuat.

Zendaya menjadi contoh yang cukup jelas. Ketika mata dibiarkan natural, perhatian berpindah ke kulit yang bercahaya dan rona hangat pada wajah.

Untuk mendapatkan efek serupa, Casillas menyiapkan kulit Zendaya dengan produk skincare sebelum mengaplikasikan complexion ringan. Ia kemudian menggunakan beberapa warna blush bernuansa mocha dan merah untuk menciptakan efek hangat di area wajah yang secara alami terkena matahari.

Pendekatan tersebut sejalan dengan tren soft face yang berkembang pada 2026. Vogue Italia menyebut estetika makeup kini semakin mengarah pada wajah yang terlihat sehat dan segar, dengan blush sebagai salah satu elemen penting, sementara contouring dan riasan mata berat mulai dikurangi. (far,ist/kum)

Saudi Blokir Rp66,6 M...dari Hal 1

Pemerintah Arab Saudi memblokir dana down payment (DP) atau uang muka penyelenggaraan ibadah haji Indonesia 2027 senilai 14 juta riyal atau sekitar Rp66,6 miliar. Pemerintah Indonesia mempersoalkan keputusan tersebut karena dana yang diblokir merupakan uang muka untuk pelaksanaan haji 2027, sedangkan alasan yang digunakan Saudi berkaitan dengan persoalan penyelenggaraan haji 2026.

Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak mengungkapkan persoalan tersebut dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/8/2026).

Menurut Dahnil, otoritas Saudi telah mengirimkan surat yang menyebutkan adanya dugaan pelanggaran ketentuan asuransi dalam penyelenggaraan haji Indonesia. Atas dasar itu, Saudi menyatakan akan memblokir sekitar 14 juta riyal dari dana Indonesia.

"Mereka sudah mengirimkan surat bahwasanya ada pelanggaran asuransi sekian-sekian, kami akan blok dana Anda sekitar 14 juta riyal," kata Dahnil.

Dahnil mengatakan pemerintah Indonesia belum dapat menerima begitu saja tuduhan tersebut karena proses verifikasi belum selesai. Pemerintah meminta Saudi memberikan rincian mengenai bentuk pelanggaran yang dimaksud, termasuk dasar kontraktual asuransi yang digunakan.

"Kami ingin data lengkapnya dulu. Kenapa? Karena kan ini belum verifikasi," ujar Dahnil.

Persoalan tersebut berawal dari penyelenggaraan haji 2026. Pemerintah Saudi disebut mempersoalkan sekitar 600 jemaah Indonesia yang tetap berangkat ke Tanah Suci meski memiliki kondisi kesehatan yang menurut ketentuan Saudi semestinya membuat mereka tidak lolos pemeriksaan.

Dahnil menyebut terdapat sembilan penyakit yang menjadi perhatian otoritas Saudi. Di antaranya gagal ginjal, gagal jantung, penyakit paru-paru kronis, sirosis, gangguan saraf, gangguan psikiatri berat, dan tuberkulosis atau TBC.

"Sembilan penyakit yang seharusnya itu tidak bisa masuk ke Saudi atau tidak lolos istitha'ah kesehatan," kata Dahnil.

Persoalan ini berkaitan dengan mekanisme istitha'ah kesehatan, yakni pemeriksaan untuk memastikan kemampuan kesehatan calon jemaah sebelum menjalankan ibadah haji.

Dahnil mengakui persoalan tersebut perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah. Ia mengatakan masih terdapat jemaah dengan kondisi kesehatan yang tetap dinyatakan lolos

pemeriksaan di dalam negeri.

"Ini memang harus koreksi kita," ujarnya.

Namun, pemerintah Indonesia belum menerima secara final seluruh klaim Saudi mengenai dugaan pelanggaran tersebut. Kementerian Haji dan Umrah meminta rincian kasus dan melakukan verifikasi sebelum menentukan apakah terdapat kewajiban pembayaran kepada Saudi.

Pemerintah Indonesia menilai tindakan Saudi problematik karena dana yang diblokir merupakan DP untuk kebutuhan haji 2027. Sementara itu, persoalan yang menjadi dasar sanksi berkaitan dengan pelaksanaan haji 2026.

"Uang yang kami kirimkan sebagai DP itu adalah uang yang diperuntukkan untuk haji 2027. Sedangkan yang mereka blok dan mau mereka ambil itu adalah untuk haji 2026," kata Dahnil.

Sebelumnya, Indonesia memang telah mengirimkan dana dalam jumlah besar untuk mengamankan kebutuhan layanan haji 2027. Total dana yang disiapkan mencapai lebih dari Rp4 triliun.

Dilaporkan dana tersebut terdiri atas kebutuhan tenda sebesar sekitar 173,2 juta riyal atau Rp808,3 miliar dan paket layanan dasar serta visa sekitar 685,5 juta riyal atau Rp3,19 triliun. Total kebutuhan DP yang diajukan Kementerian Haji dan Umrah mencapai 858,74 juta riyal atau sekitar Rp4,007 triliun.

Dana tersebut diperlukan antara lain untuk mempertahankan lokasi tenda jemaah Indonesia agar tidak dialihkan kepada negara lain yang lebih dahulu mengonfirmasi penggunaan lokasi.

Karena itu, pemerintah tidak ingin dana yang telah dialokasikan untuk layanan Haji 2027 digunakan untuk menyelesaikan persoalan yang muncul dari penyelenggaraan Haji 2026.

Kementerian Haji dan Umrah telah mengirimkan nota diplomatik keberatan kepada pemerintah Saudi. Pemerintah meminta penjelasan lebih terperinci mengenai dugaan pelanggaran asuransi dan dasar pengenaan sanksi senilai 14 juta riyal tersebut.

"Kami meminta rinciannya. Yang Anda maksud asuransi yang kami langgar itu mana-mana saja dan seperti apa? Kita harus melakukan verifikasi," kata Dahnil.

Pemerintah juga meminta dukungan DPR untuk memperkuat posisi Indonesia dalam proses negosiasi dengan otoritas Saudi. Menurut Dahnil, pembicaraan diplomatik masih berlangsung.

Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan juga menegaskan pemerintah akan menempuh jalur diplomasi untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Pemerintah pada dasarnya tidak menutup kemungkinan adanya kewajiban pembayaran apabila hasil verifikasi membuktikan terdapat pelanggaran dalam penyelenggaraan Haji 2026.

Namun, Dahnil mengatakan pembayaran tersebut tidak akan sertamerta diambil dari dana sekitar Rp4 triliun yang telah dikirim sebagai DP Haji 2027.

Kemenhaj menyiapkan dana hasil efisiensi penyelenggaraan haji 2026 sebagai alternatif untuk memenuhi kewajiban apabila hasil verifikasi menyatakan Indonesia memang harus membayar.

"Berarti kan kita harus bayar dari dana efisiensi tadi, bukan dari dana Rp4 triliun yang sudah kita kirim," kata Dahnil.

Biaya Haji Bisa Naik 15%

Pemerintah mengusulkan kenaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2027 hingga sekitar 15 persen. Jika disetujui, biaya rata-rata penyelenggaraan haji menjadi Rp107,34 juta per jemaah, naik hampir Rp20 juta dibandingkan BPIH 2026.

Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menyampaikan usulan tersebut dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (19/8/2026).

"Pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH per (calon) jemaah sebesar Rp107.340.172,02," kata Irfan. (<https://www.metrotvnews.com>)

Angka tersebut naik Rp19.930.806,57 dibandingkan BPIH 2026 yang berada di kisaran Rp87,4 juta. Dengan demikian, kenaikannya sekitar 22,8 persen jika dibandingkan angka BPIH 2026 tersebut.

Namun, pemerintah menyebut kisaran penyesuaian BPIH yang akan diajukan berada pada 10-15 persen, sementara angka final masih harus dibahas bersama DPR. Detik mencatat usulan Rp107,34 juta merupakan angka yang sebelumnya telah disampaikan pemerintah dalam evaluasi haji 2026.

Kenaikan BPIH tidak otomatis berarti biaya yang dibayar langsung jemaah (Bipih) naik dengan persentase yang sama.

Kemenhaj mengusulkan komposisi pembiayaan 2027 dengan 40 persen Bipih dibayar jemaah dan 60 persen berasal dari nilai manfaat dana haji yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Dengan skema tersebut, jemaah diperkirakan membayar sekitar Rp42,8 juta, sedangkan sekitar Rp64,2 juta berasal dari nilai manfaat.

Irfan mengatakan skema tersebut disiapkan untuk menjaga agar kenaikan biaya yang harus ditanggung langsung jemaah tidak terlalu besar.

"Mengusulkan skema pembiayaan 60 persen nilai manfaat dan 40 persen

Biaya Perjalanan Ibadah Haji, Bipih. Usulan ini diajukan untuk meringankan beban finansial jemaah di tengah proyeksi kenaikan," kata Irfan.

Pemerintah menyebut terdapat sejumlah komponen yang mendorong kenaikan BPIH 2027.

Kementerian Haji dan Umrah menyebut perubahan asumsi nilai tukar, biaya penerbangan, akomodasi di Makkah dan Madinah, transportasi darat, layanan Masyair, hingga pelayanan kesehatan sebagai faktor yang memengaruhi kebutuhan biaya penyelenggaraan haji.

Dari total usulan Rp107,34 juta, biaya penyelenggaraan di Arab Saudi mencapai sekitar Rp60,89 juta atau 56,73 persen. Sementara biaya penyelenggaraan di dalam negeri mencapai Rp46,45 juta atau 43,27 persen, termasuk biaya penerbangan rata-rata perjemaah.

Faktor lain berasal dari perubahan kebijakan layanan di Arab Saudi. Irfan mengatakan terdapat peningkatan fasilitas akibat penggunaan Paket C.

"Tentu pelayanan di Armuzna, pasti itu berbeda. Tenda-tendanya berbeda, kasurnya berbeda ukuran-ukurannya. Kemudian layanan lain kita berharap makan juga konsumsi akan ada sedikit peningkatan," ujar Irfan.

Pemerintah juga menyebut faktor inflasi global, harga bahan bakar minyak, serta kebijakan Saudi terkait paket layanan sebagai bagian dari pertimbangan penyesuaian biaya.

Meski angka Rp107,34 juta telah diusulkan pemerintah, besaran BPIH 2027 belum menjadi keputusan final.

Usulan tersebut masih akan dibahas bersama Komisi VIII DPR melalui Panitia Kerja (Panja) BPIH. Pemerintah juga masih harus menyepakati komponen biaya serta komposisi antara Bipih dan nilai manfaat.

Irfan mengatakan pemerintah tetap berupaya agar kenaikan biaya yang dibayar langsung oleh jemaah tidak signifikan.

"Kami melakukan penyesuaian besaran BPIH tahun depan dalam rangka memberikan peningkatan kualitas layanan kepada jemaah," kata Irfan dalam rapat bersama Komisi VIII DPR.

Di sisi lain, Komisi VIII DPR RI mendorong pemerintah memperpanjang masa pelunasan biaya perjalanan ibadah haji 2027 hingga sekitar lima bulan. Usulan itu muncul di tengah pembahasan biaya haji tahun depan yang masih harus disepakati pemerintah dan DPR.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid mengatakan waktu pelunasan yang lebih panjang diperlukan agar calon jemaah memiliki ruang yang cukup untuk menyiapkan dana keberangkatan. (.wid,cnbc,ant,rls/dya)



DPRD JATIM TEKANKAN P-APBD 2026 HARUS BERDAMPAK NYATA BAGI RAKYAT

SURABAYA- DPRD Jawa Timur menekankan agar Perubahan APBD (P-APBD) Jatim 2026 tidak berhenti pada perubahan angka pendapatan dan belanja, tetapi benar-benar menghasilkan manfaat yang dirasakan masyarakat.

Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD Jatim dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap Raperda P-APBD Jatim 2026, Selasa (18/8/2026).

Wakil Ketua DPRD Jatim, Sri Wahyuni, mengungkapkan pemandangan umum fraksi menjadi pijakan bersama dalam menentukan arah kebijakan pembangunan Jawa Timur. Menurutnya, pembahasan P-APBD harus diarahkan untuk menghasilkan kebijakan yang membawa kesejahteraan bagi masyarakat.

"Rapat paripurna hari ini adalah mendengarkan pandangan masing-masing fraksi terkait dengan perubahan APBD Jatim 2026. Pandangan ini nantinya semoga dapat menjadi pijakan bersama dalam menentukan kebijakan yang ada di Jatim dengan harapan dapat membawa kesejahteraan bagi masyarakat Jatim," ungkap Sri Wahyuni.

Lebih lanjut, sejumlah fraksi kemudian memberikan catatan terhadap perubahan struktur anggaran, terutama terkait kenaikan belanja, kemampuan penyerapan, penggunaan SiLPA, hingga manfaat program bagi masyarakat.

Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra DPRD Jatim, Hartono, menilai setiap perubahan anggaran perlu diuji berdasarkan kebutuhan, dasar perencanaan, kesiapan pelaksanaan, hingga manfaatnya bagi masyarakat.

"Setiap perubahan anggaran yang material perlu diuji dari sisi kebutuhan, dasar perencanaan, kesiapan pelaksanaan, dan manfaatnya bagi masyarakat," kata Hartono.



Pimpinan Rapat Paripurna sekaligus Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sri Wahyuni

Dalam P-APBD 2026, belanja daerah meningkat sekitar Rp2,64 triliun dari Rp27,23 triliun menjadi Rp29,87 triliun. Belanja modal juga meningkat dari sekitar Rp1,09 triliun menjadi Rp2,16 triliun.

Hartono menegaskan tambahan anggaran tersebut harus memiliki target yang jelas dan tidak sekadar meningkatkan angka belanja.

"Tambahan anggaran tidak cukup hanya besar secara nominal, tetapi harus memiliki target hasil yang jelas, terukur dan benar-benar dirasakan masyarakat Jawa Timur," ujarnya.

Perhatian Fraksi Gerindra juga diarahkan pada belanja modal jalan, jaringan dan irigasi yang meningkat dari sekitar Rp182,88 miliar menjadi Rp999,21 miliar. Di sisi lain, realisasi belanja modal hingga Semester I 2026 baru mencapai 16,37 persen.

Hartono mengingatkan percepatan pelaksanaan anggaran tidak boleh dilakukan hanya untuk

mengejar tingkat serapan.

"Percepatan harus didukung, tetapi tidak boleh berubah menjadi ketegesaan hanya untuk mengejar angka penyerapan. Ukuran keberhasilan tetap kualitas, keselamatan, umur layanan, dan manfaat bagi masyarakat," tegasnya.

Senada dengan itu, Juru Bicara Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim, Sumardi, menyoroti penggunaan SiLPA 2025 sebesar sekitar Rp3,38 triliun untuk membiayai P-APBD 2026. Menurutnya, besarnya SiLPA juga menunjukkan adanya evaluasi yang perlu dilakukan terhadap pelaksanaan anggaran sebelumnya.

"Secara hukum hal ini dimungkinkan, tetapi besarnya SiLPA juga menunjukkan anggaran sebelumnya belum optimal. Karena itu penggunaan SiLPA harus diprioritaskan kebutuhan yang jelas, siap dilaksanakan dan memberi manfaat secara langsung," kata Sumardi.

Sumardi menilai tambahan anggaran dalam P-APBD harus diikuti kesiapan pelaksanaan agar tidak kembali menjadi SiLPA.

"FPG meminta setiap tambahan pagu disertai dengan kesiapan proyek, jadwal pengolahan, target fisik dan kebutuhan yang terukur. Anggaran yang belum siap dilaksanakan sebaiknya dirasionalisasikan agar tidak menjadi Silpa," ujarnya.

Fraksi Golkar juga memberi perhatian terhadap kewajiban pembayaran komponen Tunjangan Profesi

Guru dalam THR dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2025 sekitar Rp274,57 miliar bagi guru ASN daerah yang memenuhi persyaratan.

"Dipastikan penyelesaian sebelum belanja lainnya," tegas Sumardi.

Sementara itu, Fraksi Partai NasDem DPRD Jatim menilai peningkatan belanja daerah harus memiliki korelasi yang jelas dengan peningkatan kualitas pembangunan. Belanja daerah dalam P-APBD 2026 meningkat sekitar Rp2,64 triliun, sementara pendapatan daerah hanya bertambah sekitar Rp183,78 miliar.

"Peningkatan belanja tersebut harus memiliki korelasi yang jelas dengan peningkatan kualitas pembangunan. Jangan sampai tambahan anggaran hanya memperbesar volume belanja, tetapi tidak memperbesar manfaat yang diterima masyarakat," pungkas Juru Bicara Fraksi NasDem, Ra Nasih.(adv,pra/dya))



Juru Bicara Fraksi Gerindra DPRD Jawa Timur, Hartono



Juru Bicara Fraksi Golkar DPRD Jawa Timur, Sumardi



Juru Bicara Fraksi NasDem DPRD Jawa Timur, Ra Nasih